

# MEMO HUKUM

*ADIANA DEWI R*

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN  
MELALUI LEMBAGA TRIPARTITE  
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PERORANGAN  
DI PERUSAHAAN SWASTA  
(STUDY KASUS P.T. KALI JAYA PUTRA)**



KK.  
Per 2197/96  
adi  
P

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN  
MELALUI LEMBAGA TRIPARTITE  
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PERORANGAN  
DI PERUSAHAAN SWASTA  
( STUDY KASUS P.T. KALI JAYA PUTRA )**



KK.  
Per 2197/46  
adi  
p

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**MEMO HUKUM**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**R. INDIARSORO, S.H.  
NIP. 130 325 845**

**Penyusun,**

**ADIANA DEWI R  
NIM. 039213488**

## V. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

- a. Hak-hak yang diterima oleh Moch Choirul selaku pekerja di P.T. KALI JAYA PUTRA yang terkena pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah adalah belum sesuai dengan ketentuan pasal 21, 23 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, uang jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta.
- b. Upaya yang dapat dilakukan Moch.Choirul selaku pihak buruh apabila menolak putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan daerah (P4D), adalah meminta pemeriksaan ulangan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), dalam jangka waktu 14 hari setelah ada putusan dari P4D.

### 2. SARAN

- a. Dalam hal ini menurut saya sebaiknya hak buruh, dapat dipenuhi seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996, khususnya pasal 21 dan 23 mengenai penetapan uang pesangon dan uang ganti kerugian akibat adanya pemutusan hubungan

kerja.

- b. Pada penyelesaian sengketa perburuhan, upaya yang dapat dilakukan pihak buruh apabila kekuatan yang pasti dari P4P yang sudah mempunyai kekuatan hukum tidak dilaksanakan, buruh dapat meminta bantuan pihak Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusinya.